

Collaborative Governance Pentahelix: Inovasi Membangun Kota Pendidikan Inklusif Menuju Tataan Sumber Daya Unggul Kajian Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Disabilitas di Kota Yogyakarta

Pentahelix Collaborative Governance: Innovation in Building an Inclusive Education City Towards a Superior Resource System ***Study of Education Fulfillment for Disability Communities in Yogyakarta City***

Arissy Jorgi Sutan¹ , Hendy Setiawan² 

¹ Universitas Jambi, Indonesia

² Universitas Selamat Sri Batang, Indonesia

Penulis Korespondensi

Arissy Jorgi Sutan
arissyjorgisutan@unja.ac.id

Histori Artikel

Diajukan: 18 Oktober 2024
Revisi Akhir: 24 Desember 2024
Disetujui: 27 Desember 2024
Terbit: 30 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pembangunan kota pendidikan inklusif dengan kajian pemenuhan pendidikan bagi masyarakat disabilitas di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas masih menghadapi tantangan signifikan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 75% anak disabilitas belum mendapatkan pendidikan, meskipun regulasi sudah ada untuk mendukung hak pendidikan mereka. Perlunya kolaborasi antara sektor akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (pentahelix) untuk mewujudkan kota pendidikan yang inklusif. Dengan langkah-langkah konkret yang telah diambil, seperti pengembangan Kampung Peduli Sehat Jiwa, Yogyakarta berupaya menjadi barometer kota inklusif di Indonesia. Namun, tantangan dalam mengakomodasi semua kelompok disabilitas dalam sistem pendidikan masih perlu ditangani agar tujuan inklusi dapat tercapai secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif dan inklusif bagi masyarakat disabilitas di Yogyakarta.

Kata Kunci

Inklusif; *Pentahelix Collaborative Governance*; Kota Pendidikan Inklusif; Pendidikan

Abstract

This study aims to analyze the development of an inclusive education city by studying the fulfillment of education for people with disabilities in the city of Yogyakarta. This study uses a qualitative method and a case study approach. Data in this study were collected through literature studies. The results of the study show that although Yogyakarta is known as a student city, access to education for children with disabilities still faces significant challenges. Data shows that more than 75% of children with disabilities have not received an education, even though regulations already exist to support their right to education. Collaboration is needed between the academic, business, community, government, and media sectors (pentahelix) to realize an inclusive education city. With concrete steps that have been taken, such as the development of the Kampung Peduli Sehat Jiwa, Yogyakarta is trying to become a barometer of inclusive cities in Indonesia. However, the challenges in accommodating all disability groups in the education system still need to be addressed so that the goals of inclusion can be achieved effectively. This study is expected to contribute to the development of more responsive and inclusive education policies for people with disabilities in Yogyakarta.

Keywords

Inclusive; Pentahelix Collaborative Governance; Inclusive Education City; Education

1. Pendahuluan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis tentang pembangunan kota pendidikan inklusif dengan kajian pemenuhan pendidikan bagi masyarakat disabilitas di Kota Yogyakarta. Isu pendidikan inklusif yang merupakan bagian dari isu pendidikan secara umum menarik dibicarakan karena sektor tersebut menjadi penting dan krusial dalam mewujudkan sumber daya unggul. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional (Nugraheni & Sudarwati, 2021). Tanpa adanya upaya merevitalisasi dan menata kembali sistem pendidikan dengan barometer yang terarah dan terukur, maka pembangunan nasional setiap bangsa tidak akan tercapai secara maksimal. Tidak heran apabila isu pendidikan menjadi perhatian global dan setiap negara-negara yang ada dituntut untuk membangun satu system pendidikan komprehensif yang mampu menjangkau, merata, dan dinikmati oleh setiap warganya (Hikmah, 2023). Hal tersebut mengingat bahwa pendidikan menjadi hal dasar yang harus dipenuhi oleh negara sehingga di masa yang akan datang mampu melahirkan generasi-generasi cerdas dan cemerlang yang diharapkan mampu berkontribusi pada pembangunan negara yang maju dan kompetitif.

Pendidikan di Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang berbunyi “..*Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa...*”. Bunyi alenia tersebut menekankan pada proses pencerdasan bangsa, di mana salah satu cara yang dilakukan ialah adanya pemenuhan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut maka negara berkewajiban dalam membangun sistem pendidikan bagi setiap warganya serta memastikan tidak ada satu warga negara satupun yang kesulitan dalam mengakses pendidikan (Afriyadi, 2020). Amanat konstitusi juga memperjelas bahwa negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari keseluruhan total APBN (Fironika, 2015). Sudah sepatutnya demikian, mengingat pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan negara wajib menunaikan amanat konstitusi. Jika tidak, maka negara

belum mampu menunaikan perintah konstitusi di bidang kebutuhan dasar pendidikan bagi setiap warganya. Permasalahan pendidikan menjadi begitu penting karena berkaitan dengan proses pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul demi terwujudnya Indonesia menjadi negara maju di tahun emas tahun 2045.

Jalan panjang dalam menyiapkan sistem pendidikan menuju Indonesia emas di tahun 2045 tentu tidaklah mudah. Masih banyak pekerjaan berat yang sampai hari ini memerlukan perhatian khusus dalam rangka mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Salah satu hal yang masih cukup penting dan relevan ialah isu pendidikan inklusif dan ramah bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pemerintah harus menyadari bahwa setiap warga negara tidaklah sama dan tidak bisa pula diperlakukan merata. Ada kelompok-kelompok rentan yang harusnya dilindungi oleh negara (Nisa, 2019). Namun demikian, keadaan itu tidak boleh menutup mata bahwa perbedaan itu tidak akan menghalangi mereka untuk diperlakukan sama dan setara dalam pemenuhan akses pendidikan (Septiana & Zulfa, 2019).

Model pengembangan pendidikan inklusif yang seharusnya mereka dapatkan nampaknya sampai hari ini belum seutuhnya dapat diwujudkan. Laporan tahun 2023 yang dirilis oleh UNICEF dan Bappenas menunjukkan bahwa walaupun jumlah sekolah inklusif di Indonesia meningkat, namun anak-anak disabilitas masih berpeluang lebih rendah untuk sekolah dan menyelesaikan pendidikan jika dibandingkan temen-temannya yang non-disabilitas. Sebanyak 36% anak dengan kondisi disabilitas tidak sekolah, dan hanya 8% anak tanpa disabilitas menghadapi situasi yang sama (UNICEF, 2023). Artinya peningkatan jumlah sekolah inklusif di Indonesia tidak menjamin pemenuhan akses pendidikan bagi masyarakat disabilitas.

Sementara itu berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2023 disebut bahwa lebih dari 75% anak disabilitas belum mengenyam pendidikan. Hal ini kontras mengingat regulasi dan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas sudah terakomodasi dalam CRPD, SDG's, dan konvensi hak anak dan UU Nomor 8 Tahun 2016 (Kemenko

PMK, 2023). Sementara itu, berdasarkan catatan Tempo menyebutkan bahwa penyandang disabilitas masih kesulitan akses pendidikan inklusif (Persada, 2021). Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menyebutkan hanya 56% anak disabilitas yang lulus sekolah dasar dan 3 dari 10 orang disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan. Di sisi lain, alih-alih data statistik pendidikan tahun 2018 presentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Penyandang disabilitas yang belum dan tidak pernah sekolah sama sekali mencapai 23,91% dan tidak bersekolah lagi sebesar 70,62% (Ansori, 2024). Berdasarkan realitas tersebut maka yang menjadi persoalan sekaligus pertanyaan ialah dengan regulasi dan kebijakan yang memadai mengapa tidak sejalan dengan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat disabilitas. Hal ini tentu menjadi masalah serius karena pendidikan inklusif menjadi bagian yang terintegral dalam mewujudkan pembangunan nasional yang setara dan berkeadilan.

Cara pandang masyarakat mengenai pendidikan inklusif masih bias dan kurang tepat di dalam memposisikannya. Mereka sebagian besar menganggap bahwa pendidikan inklusif hanya berlaku pada sekolah khusus saja, sebut saja Sekolah Luar Biasa (SLB). Lembaga ini dianggap sebagai wadah bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam akses pendidikan. Cara pandang ini telah mengeksklusifitaskan mereka dan menciptakan stigma bahwa SLB hanya diperuntukkan bagi mereka yang berkebutuhan khusus (pedulidifabel.ukm.ugm, 2021). Padahal setiap lembaga pendidikan tanpa terkecuali harus berwatak inklusif sehingga tidak ada lagi pendikotomian hal demikian. Oleh karenanya pengembangan kota pendidikan inklusif harus menjadi basis model bagi wilayah lainnya bahwa mereka yang berkebutuhan khusus memiliki hak atas perlakuan yang sama dan setara, adil, merata dan tidak boleh ada pendiskriminasian akan mereka. Termasuk di dalamnya sekolah-sekolah pada umumnya yang juga harus memperlakukan sama dan tidak boleh menolak setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Inilah yang sebetulnya harus dikembangkan dan dikuatkan bila ingin membangun kota pendidikan inklusif yang sesungguhnya. Namun selama masih dijumpai penolakan terhadap kelompok disabilitas

dalam mengakses pendidikan, maka belum dapat dikatakan pendidikan itu inklusif.

Menyikapi realitas tersebut, salah satu kota yang sedang gencar dalam membangun identitas kota inklusif ialah Kota Yogyakarta. Kota ini tentu menarik karena sebagai salah satu kota dengan julukan kota pelajar di Indonesia, apakah mereka sudah mengakomodasi pendidikan inklusif bagi masyarakat disabilitas. Terlebih di tahun 2023 berdasar survei dari Goodstats 70% responden memilih Jogja sebagai kota tujuan pendidikan di Indonesia (Sunartono, 2023). Keadaan ini semakin menarik dan menguatkan bagaimana Kota Yogyakarta mewujudkan kota inklusif yang di dalamnya mengakomodasi kelompok berkebutuhan khusus yang akan belajar di sana dengan situasi animo pelajar yang datang dari berbagai wilayah baik nasional maupun lingkup global. Kota Yogyakarta tentu dalam membangun tatanan kota pendidikan inklusif ini harus menggandeng setiap pihak, salah satunya adalah terdapatnya Sekolah yang masuk kategori Unit Layanan Disabilitas seperti SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan SMP Negeri 15 Yogyakarta. Hal tersebut mengingat kota inklusif pendidikan bukan hanya sebatas wacana dan narasi semata, namun tindakan dan implementasi nyata yang wajib diwujudkan. Terlebih identitas Jogja sebagai kota pelajar tentu keberhasilan membangun kota inklusif pendidikan akan sangat tergantung seberapa luas jaringan dan mitra yang terlibat dalam berkolaborasi bersama.

Studi terdahulu tentang pengembangan pendidikan inklusif sudah banyak dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya terbagi dalam tiga kelompok besar penelitian terdahulu tentang pendidikan inklusif. Bagian pertama mereka yang berfokus pada pengelolaan model pendidikan inklusif yang dilakukan di sekolah mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pada pendidikan tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh (Agustina, 2018; Utama, 2021; Wati, 2014; Sahrudin *et al.*, 2023; Lukitasari *et al.*, 2017; Sartica & Ismanto, 2016; Sholihah & Chrysoekamto, 2021). Kelompok ini menekankan bahwa pendidikan inklusif menjadi penting dalam mewujudkan pendidikan yang aksesibel dan merata tanpa diskriminasi. Namun demikian, para peneliti terdahulu ini menunjukkan bahwa menciptakan

pendidikan inklusif tidaklah mudah. banyak faktor yang dinilai menghambat implementasi dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Faktor tersebut meliputi adanya kebijakan yang belum tersosialisasi bagi masyarakat dan sekolah dengan baik, keterbatasan anggaran, unsur-unsur pemenuhan pendidikan inklusif yang seharusnya serta partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dengan baik, komunikasi antar pemangku kebijakan yang terkadang tidak berjalan, serta kesadaran dari implementator yang masih kurang.

Bagian kelompok kedua ialah studi terdahulu yang menekankan pada aspek pembangunan inklusif dengan menekankan pada aspek pembangunan kota yang inklusif. Tentu studi ini cakupannya lebih luas tidak hanya sebatas sekolah. Kajian ini dilakukan oleh Warsilah (2015), Hardiansah (2015), Nadhifa *et al.* (2023), dan Mustaqim *et al.* (2023a). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kota yang inklusif menjadi solusi dalam mengurangi eksklusi sosial akibat pengelolaan kota yang selalu iorientsikan pada pembangunan pertumbuhan ekonomi. Berdasar pada survei Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) 2024 silam terhadap 18 kota yang tertuang dalam Most Liveable City Index menunjukkan bahwa hanya ada 8 kota yang memiliki indeks kelayakan huni di atas rata-rata nasional yaitu 62,39. Kota tersebut meliputi Balikpapan, Solo, Malayang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Bandung, dan Semarang. Salah satunya indikator penopang kota layak huni yakni pembangunan inklusif. Konsep pembangunan inklusif dalam kota layak huni harus menekankan pada aspek kota yang ramah pada disabilitas dalam berbagai sector, termasuk di dalamnya yakni aspek pendidikan yang setara dan akses yang tanpa diskriminatif bagi mereka.

Selanjutnya kelompok literatur ketiga yakni mereka para peneliti terdahulu yang berfokus pada kolaborasi dan inovasi dalam membangun kota inklusi. Mereka ialah Setiawan *et al.* (2019), Abinda Firdaus *et al.* (2022), Abassuni *et al.* (2023), dan Suranto & Suhita (2023). Kelompok ini menekankan bahwa dalam pengembangan kota inklusif keberadaan aspek kolaborasi dan inovasi menjadi bagian penting. Setiap daerah yang berkomitmen dalam membangun kota yang inklusif tentu harus dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak serta diikuti dengan kebijakan dan program inovasi sehingga kota inklusif tersebut termanifestasikan dalam

berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan aspek lingkungan lainnya. Artinya masyarakat dengan tingkat kedisabilitasnya dapat menikmati dan mendapatkan akses yang sama di berbagai bidang tanpa ada rasa diskriminasi dan ketidakadilan. Bahkan tidak boleh juga mendikotomikan kelas sosial antara mereka karena mereka hidup, tinggal dan tumbuh dalam wadah kota inklusif tersebut.

Ketiga klaster penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penelitin tentang upaya perwujudan kota inklusif dan pendidikan inklusif sudah banyak dilakukan. Namun demikian, dengan pemetaan tersebut maka peneliti dalam tulisan ini akan mempertegas kembali dengan pendekatan yang lebih kompleks dan mendalam yakni terkait dengan *collaborative governance pentahelix* dalam membangun kota pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Peneliti mempertimbangkan bahwa penelitian terkait dengan pendekatan *collaborative governance pentahelix* yang melibatkan pilar lima sector dalam upaya membangun kota pendidikan inklusif masih sangat terbatas dilakukan. Ada beberapa peneliti yang sudah ditemukan yakni hanya menggunakan *collaborative governance* yakni tiga pilar dan itupun tidak secara spesifik mengulas tentang pembangunan kota pendidikan inklusif. Oleh karena itu rumusan utama dari tulisan penelitian ini adalah bagaimana *collaborative governance pentahelix* dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan inklusif di Indonesia. Tulisan ini menarik karena setidaknya ada tiga alasan kuat mengapa penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan dua dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, menunjukan bahwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi sosial. Undang-undang ini menekankan akses pendidikan inklusif, kuota pekerjaan, serta fasilitas publik yang ramah disabilitas untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif mereka. Namun, tantangan implementasi seperti keterbatasan

fasilitas dan rendahnya kesadaran masyarakat masih perlu diatasi.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendidikan Inklusif menegaskan upaya pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas. Regulasi ini menyoroti pentingnya penerapan pendidikan inklusif di semua jenjang pendidikan, dari tingkat dasar hingga menengah, dengan menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Permendikbudristek ini juga menetapkan kewajiban sekolah untuk menghadirkan guru pendamping khusus (GPK), fasilitas yang aksesibel, serta kurikulum yang adaptif guna mendukung proses pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus. Selain itu, peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas tetap harus diatasi untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan berkelanjutan.

Alasan pertama adalah tema yang diangkat oleh peneliti. Isu pendidikan disabilitas merupakan topik sensitif yang sering dianggap oleh masyarakat awam sebagai isu yang kurang prioritas. Padahal, dalam konteks pendidikan yang masih menghadapi berbagai masalah, akses untuk kelompok penyandang disabilitas belum terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, isu ini membutuhkan ruang diskusi dan perhatian serius agar hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dapat terjamin. Hal ini sejalan dengan semangat membangun kota inklusif, di mana pendidikan inklusif menjadi salah satu pilar utama untuk menciptakan sistem yang ramah bagi semua.

Alasan kedua adalah pendekatan penelitian ini yang berfokus pada studi komparasi, mengintegrasikan konsep pendidikan inklusif dengan kota inklusif. Banyak klaim mengenai keberadaan kota inklusif dan pendidikan inklusif, namun implementasinya seringkali belum ramah bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks Kota Yogyakarta, yang dikenal sebagai Kota Pelajar dengan berbagai fasilitas pendidikan. Namun, untuk memastikan apakah kota ini benar-benar inklusif dalam praktiknya, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi kondisi yang ada.

Alasan ketiga adalah pendekatan teoritis yang digunakan, yaitu kolaborasi pentahelix atau dikenal dengan pendekatan ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, Media*). Kolaborasi ini mencakup lima sektor yang memiliki peran masing-masing untuk saling mendukung. Sinergi antar sektor ini diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan kota inklusif dalam konteks pendidikan dari berbagai perspektif. Dengan tiga alasan tersebut, penelitian ini memiliki dasar yang kuat dan layak untuk dilakukan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu analisis terhadap berbagai sumber literatur, artikel, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan data secara rinci tanpa membuat interpretasi yang spekulatif. Analisis deskriptif melibatkan klasifikasi data, presentasi data dalam tabel dan diagram, serta refleksi etnografi untuk memastikan kesesuaiannya dengan teori dan praktik yang ada. Dengan metode ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena sosial yang diamati, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi akademika dan praktek profesional.

3. Hasil dan Pembahasan

Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota di Indonesia di mana memiliki komitmen yang cukup kuat dalam membangun kota inklusi. Apalagi predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar di Indonesia semakin menguatkan bagaimana pemerintah kota memiliki keseriusan dalam membangun kota inklusi termasuk di dalamnya sektor pendidikan. Perwujudan kota inklusi yang sedang gencar dilakukan oleh Kota Yogyakarta bukanlah sebatas narasi dan wacana belaka. Namun telah banyak langkah konkret yang dilakukan dalam rangka membangun system inklusif tersebut. Berbagai inovasi diluncurkan misalnya di tahun 2017 Yogyakarta mengembangkan Kampung Peduli Sehat Jiwa. Langkah ini sebagai bagian dari agenda baru dalam upaya mewujudkan kota inklusif yang dimulai dan berbasis

pada rintisan kelurahan dan kecamatan. Upaya peningkatan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat juga diperhatikan, yakni di sector pendidikan, kesehatan, dan bahkan akses untuk mendapatkan pekerjaan (Rozali, 2017). Kota Yogyakarta di samping itu juga memiliki kemauan kuat dalam mewujudkan kotanya sebagai barometer kota Inklusif di Indonesia. Oleh karena itu dalam merealisasikan hal itu maka berusaha seoptimal mungkin dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya langkah konkret mengakomodir pendidikan bagi mereka (Rusqiyati, 2019).

Pentingnya mengakomodasi pendidikan bagi kelompok disabilitas tentu juga menjadi bagian dalam menguatkan Yogyakarta sebagai kota inklusi di Indonesia. Apalagi sampai saat ini Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mampu mengakomodir dalam hal pemberian jaminan bahwa setiap kelompok disabilitas wajib mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Masih banyak ditemukan beberapa kelompok disabilitas yang bahkan tidak diberikan akses pendidikan yang menyeluruh dan holistik. Data di tahun 2023 menyebut bahwa ada sekitar 7.500 anak berkebutuhan khusus di D.I. Yogyakarta di mana 5.073 anak tersebut sekolah di SLB. Ada sekitar 1.200-an anak yang tidak sekolah karena orang tua kesulitan mengantar (Sijogja, 2023). Artinya system pendidikan inklusi harus benar-benar dibuatkan system dari hulu sampai hilir sehingga memastikan mereka memperoleh pendidikan yang layak adalah hal utama dalam membangun dasar sekaligus pondasi kota inklusi itu sendiri. Pendidikan untuk semua tanpa terkecuali dan mengeksklusi yang lainnya tentu akan memantapkan ke depan dalam penguatan kota pendidikan inklusi yang pada akhirnya mampu mempertahankan dan juga meningkatkan indeks pembangunan manusia yang unggul. Namun, untuk mewujudkan itu semua Pemerintah Kota Yogyakarta memerlukan kolaborasi dan bersinergi dengan semua komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Yogyakarta yang inklusif di bidang pendidikan.

3.1. Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penguatan Kota Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memulai mengembangkan sistem pendidikan inklusi sebagai bentuk penguatan kota pendidikan inklusif di Indonesia

sejak kurang lebih dua dekade terakhir. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan sistem cakupan dan perlindungan pendidikan inklusi. Beberapa peraturan yang ada yakni terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya di tahun yang sama juga ada Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Termasuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Warta Jogja Kota, 2024). Artinya penguatan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta mulai menguat sejak tahun 2008. Ini tentu menjadi sebuah kesadaran yang mampu membangun kemajuan pendidikan setara karena proses memikirkan pendidikan inklusi kala itu tidak terlalu banyak diakomodasi. Oleh karena itu, dengan berlandaskan beberapa regulasi yang ada, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang terdepan dalam memulai sekaligus menginisiasi pengembangan pendidikan inklusi dalam rangka menciptakan pembangunan manusia yang merata dan berkeadilan, dalam hal ini dijelaskan pada langkah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY secara aktif mendorong pembentukan ULD di tingkat kabupaten dan kota untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan inklusif. Upaya ini diperkuat dengan sosialisasi kebijakan dan pelatihan bagi pendidik serta tenaga kependidikan, guna meningkatkan kompetensi dalam menangani ABK. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK) dan fasilitas yang aksesibel di beberapa sekolah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah DIY telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yang bertujuan memperkuat regulasi dan implementasi pendidikan inklusif di seluruh wilayah DIY.

Sementara itu dalam konteks yang lebih tinggi, yakni Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta baru memiliki dasar penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasar pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Mengacu pada Peraturan gubernur tersebut dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan



Gambar 1. Kunjungan BPMP Banten ke ULD Kota Yogyakarta (BPMP Jogja, 2024).

yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (LLDikti 5, 2022). Aturan ini menekankan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pendidikan pemerintah harus memberikan akses dan perlakuan yang setara bagi mereka yang berkebutuhan khusus sehingga mereka mampu mengenyam pendidikan yang layak. Secara regulasi tentu dalam mewujudkan penguatan sistem pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta telah memiliki dasar hukum yang kuat. Hal itu terbukti dengan adanya regulasi dari Kota Yogyakarta sendiri yang lahir sejak tahun 2008 dan dikuatkan kembali oleh Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta di tahun 2013. Namun demikian, yang paling penting ialah memastikan bahwa regulasi yang sedemikian rupa dan telah ada harus mampu memberikan dampak manfaat yakni tidak ada lagi masyarakat disabilitas yang tidak terlayani pendidikan layak.

Upaya konkret sedikit demi sedikit terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Mereka sejak tahun 2008 di samping regulasi yang cukup, juga telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bawah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan kala itu yang bertanggungjawab adalah Kasi Manajemen Sekolah Bidang SMP. Tugas ULD kala itu ialah melayani peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam

melakukan asesmen, konsultasi, dan penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus ini yakni seperti penanganan anak dengan hambatan sosial emosional, perubahan pola mindset tim sekolah yang belum adaptif dan responsif terhadap ABK tersebut. Pada akhirnya dengan modal awal unit ULD tersebut maka pada tahun 2016 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai pertanda resmi dibentuknya ULD Kota Yogyakarta dengan beberapa tujuan, diantaranya yakni (Rakhmawanti, 2024):

1. Memberikan layanan pendukung untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan inklusi;
2. Membantu layanan asesmen bagi ABK;
3. Membantu layanan diklat peningkatan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran dalam pendampingan ABK;
4. Membantu layanan diklat vokasional bagi ABK.

Adanya ULD Kota Yogyakarta ini menariknya menjadi salah satu percontohan di Indonesia sehingga kolaborasi dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan inklusi dapat diwujudkan. Pada tanggal 31 juli sampai dengan 3 Agustus 2024 BPMP Provinsi daerah Khusus Jakarta sebagai UPT Kemdikbudritek melakukan kolaborasi dan bersinergi dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif di Jakarta. Salah satunya ialah melakukan studi tiru di ULD Kota Yogyakarta. Di sisi yang lain keberhasilan ULD Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan pendidikan disabilitas juga mendapat perhatian serius dari BPMP

Provinsi Banten. Mereka tertarik dengan model dan strategi yang dilakukan oleh ULD Kota Yogyakarta dalam memberikan layanan pendidikan inklusi agar mereka yang memiliki kebutuhan khusus juga mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang layak.

Gambar 1 merupakan kunjungan dari BPMP Provinsi banten ke ULD Kota Yogyakarta dalam rangka studi tiru pengembangan layanan pendidikan diabilitas yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2008. Adanya ULD Kota Yogyakarta sendiri di satu sisi dalam kerangka menguatkan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi pendidikan di Indonesia. Di sisi yang lain adanya ULD sejalan dengan citra Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sehingga pengakomodasian kelompok ABK dalam akses pendidikan dinilai menjadi instrument penting yang mampu berkontribusi pada aspek pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

Tidak cukup sampai di situ saja, selain regulasi dan terbentuknya ULD maka Kota Yogyakarta juga membentuk Guru Pendamping Khusus (GPK). Ini menjadi bagian dari tindak lanjut yang komprehensif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata dari hulu ke hilir. Di tahun 2024 ULD Kota Yogyakarta menambah 10 GPK baru untuk sekolah negeri dan 5 GPK untuk sekolah swasta. Sebelumnya ULD sudah memiliki 120 GPK di sekolah negeri dan 50 GPK di sekolah swasta. Artinya dengan tambahan 15 GPK tersebut maka jumlah GPK di ULD Kota Yogyakarta berjumlah 185 di tahun 2024 (Syaful, 2024).

Keberadaan GPK ini tentu sangat penting guna melayani dan memenuhi pendidikan inklusi bagi ABK. Ada perlakuan dan asesmen khusus sehingga tidak bisa dilakukan oleh semua guru secara umum. GPK menekankan pada personel guru yang memiliki keahlian khusus di bidang disabilitas sehingga komunikasi pendidikan dalam layanannya dapat terbangun dengan baik. Diharapkan keberadaan GPK di Kota Yogyakarta mampu memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusi khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jogja (Herawati, 2024). Sebagai kota pelajar maka setiap sekolah di Kota Jogja harus mengupayakan pendidikan untuk mencapai inklusi (Junianto, 2024). Oleh karena itu persebaran GPK ini ke depannya harus merata antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

3.2. Gerakan Penguatan Kota Inklusif Berbasis Masyarakat

Kontribusi masyarakat dalam mengakselerasi Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi pendidikan sangatlah penting. Hal ini mengingat peran Pemerintah Kota Yogyakarta yang masih terbatas sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam mensukseskan perwujudan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi pendidikan di Indonesia. Partisipasi masyarakat diantaranya ialah melalui musyawarah rencana pembangunan tematik di Kota Yogyakarta dan juga pembentukan Forum Kemantren Inklusi (FKI). Istilah Kemantren pada dasarnya setara dengan kecamatan hanya saja nomenklaturnya sedikit berbeda disesuaikan dengan UU Keistimewaan DI Yogyakarta. Dua hal ini menjadi titik tekan keterlibatan masyarakat Kota Yogyakarta untuk saling bersinergi dalam memastikan keberadaan disabilitas. Musyawarah rencana pembangunan tematik menjadi kegiatan strategis untuk merencanakan pembangunan penting dalam menentukan pembangunan ke depan Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas khususnya di Kota Yogyakarta (Mustaqim *et al.*, 2023a). Program Musrembang tematik ini pada intinya ingin mengakselerasi Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi termasuk dalam bidang pendidikan. Program Musrembang tematik ini juga sekaligus membuka celah yang lebar bagi setiap lapisan masyarakat sehingga antara masyarakat yang satu dan lainnya timbul rasa kepedulian antar sesama.

Di samping adanya partisipasi masyarakat melalui Musrembang tematik Kota Yogyakarta, juga ada kebijakan yang tidak kalah menarik yang turut serta melibatkan masyarakat yakni Forum Kemantren (kecamatan) Inklusi. Sejak tahun 2015 Yogyakarta telah merintis empat Kemantren Inklusif yakni Kemantren Wirobrajan, Kemantren Gondokusuman, Kemantren Kotagede dan Kemantren Tegalrejo bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional (Rusqiyati, 2015; Purwantara, 2019). Namun, dalam perjalanannya hingga saat ini dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta sudah terbentuk 10 Forum kemantren Inklusi (lihat Tabel 1).

Berdasarkan data Tabel 1 dapat dipahami bahwa sampai saat ini Forum Kemantren Inklusi di Kota

Tabel 1. Daftar Status Kemantren Kota Yogyakarta yang Sudah Terbentuk FKI

No.	Nama Kemantren	Status FKI
1	Tegalrejo	Sudah Terbentuk
2	Jetis	Sudah Terbentuk
3	Gondokusuman	Sudah Terbentuk
4	Danurejan	Sudah Terbentuk
5	Gedongtengen	Sudah Terbentuk
6	Ngampilan	Belum Terbentuk
7	Wirobrajan	Sudah Terbentuk
8	Mantrijeron	Sudah Terbentuk
9	Kraton	Sudah Terbentuk
10	Gondomanan	Belum Terbentuk
11	Pakualaman	Belum Terbentuk
12	Mergansan	Belum Terbentuk
13	Umbulharjo	Sudah Terbentuk
14	Kotagede	Sudah Terbentuk

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2024.

Yogyakarta sudah terbentuk 10 FKI dari 14 kemantren yang ada. Artinya masih tersisa 4 kemantren yang belum terbentuk FKI yakni Kemantren Ngampilan, Kemantren Pakualaman, kemantren Mergansan, dan kemantren Gondomanan. Namun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta terus menargetkan bahwa semua kemantren yang ada di Kota Yogyakarta harus membentuk FKI demi menguatkan Yogyakarta sebagai kota inklusi (Wicaksosno, 2020). Keberadaan FKI ini tentu beranggota masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga ada upaya sadar bahwa masyarakat disabilitas menjadi bagian dari mereka yang harus dipenuhi haknya serta diperjuangkan.

FKI yang diperjuangkan dan dibentuk oleh Kota Yogyakarta merupakan salah satu strategi sekaligus wadah dalam mengakomodir pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada satu realitas yang tidak bisa dilepaskan bahwa jumlah disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta cukup banyak dan diantara mereka berada dalam usia sekolah. Oleh karena itu mengingat dari sisi usia yang masih masuk dalam kelompok usia sekolah tentu adanya FKI ini menjadi instrument sekaligus katalisator perubahan pembangunan manusia yang dikontribusikan oleh keberadaan kelompok masyarakat disabilitas dalam

Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren

No.	Nama Kemantren	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tegalrejo	174	131	305
2	Jetis	174	149	323
3	Gondokusuman	156	121	277
4	Danurejan	88	60	148
5	Gedongtengen	131	111	242
6	Ngampilan	75	48	123
7	Wirobrajan	158	142	300
8	Mantrijeron	117	94	211
9	Kraton	118	105	223
10	Gondomanan	120	112	232
11	Pakualaman	55	65	120
12	Mergansan	80	61	141
13	Umbulharjo	301	254	555
14	Kotagede	151	126	277
Jumlah		1898	1579	3477

Sumber: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021.

terakomodasinya akses layanan pendidikan (lihat [Tabel 2](#)).

Berdasarkan data [Tabel 2](#) dapat dibaca bahwa setidaknya ada 6 dari 14 kemantren yang ada dengan jumlah penyandang disabilitas cukup tinggi. Keberadaan masyarakat disabilitas paling tinggi ada di Kemantren Umbulharjo yakni dengan jumlah 555 jiwa yang terinci di mana laki-laki berjumlah 301 dan perempuan berjumlah 254 jiwa. Sementara itu jumlah keseluruhan

disabilitas di Kota Yogyakarta yakni 3477 jiwa. Angka ini tentu cukup besar di mana keberadaannya mereka juga masih terkaster dalam kelompok umur yang berbeda-beda. Berdasarkan jenis kedisabilitannya dalam interval umur, maka [Tabel 3](#) merupakan persebaran jenis kedisabilitas di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data [Tabel 3](#) terlihat bahwa jumlah disabilitas di Kota Yogyakarta yang berada dalam usia sekolah cukup banyak. Artinya eksistensi mereka yang

Tabel 3. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren

Jenis	1-18 Thn	19-60 Thn	Lansia	Jumlah Perjenis
Daksa	83	567	687	1.337
Sensorik	54	296	170	520
Mental	14	735	187	36
Intelektual	115	305	25	445
Ganda	45	158	36	239
Jumlah per usia	311	2.061	1.105	3.477

Sumber: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021.

hidup dan bernaang dalam kota pelajar tentu juga harus menjadi bagian dari keseluruhan masyarakat. oleh karena itu dengan jumlah penyandang disabilitas dalam usia sekoah yang cukup banyak maka sejalan dengan terbentuknya FKI. Diharapkan keberadaan FKI di Kota Yogyakarta harus mampu bertumpu pada gerakan kesadaraan masyaarakat untuk berkolaborasi bersamaa dalam mewujudkan pemenuhan aksesibilitas layanan pendidikan di Kota Yogyakarta yang bersifat inklusi, merata, dan berkeadilan.

3.3. Kaum Intelektual: Akselerasi Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusif Indonesia

Dalam perjalannya sebagai kota Pendidikan Inklusif, kota Yogyakarta melakukan beberapa usaha yang nyata dan juga terarah. Dalam hal ini terdapat peran intelektual yang menjadi jembatan dalam pegembangan konsep dan aplikatif dari kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan Inklusif. Adanya kaum intelektual yang berkonstrasi dalam pengembangan Kota Inklusif ini menunjukan adanya komitmen dalam pengembangan masyarkart secara luas. Dalam hal ini terdapat beberapa contoh dari munculnya Kaum Intelektual sebagai Akselerasi Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusif.

Kaum intelektual terlibat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inklusi sosial, terutama bagi

kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan dukungan dari akademisi dan praktisi, telah mengidentifikasi sembilan indikator inklusivitas yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, dan lainnya. Dalam lingkup ini dapat dilihat pada beberapa lingkup dimensi yaitu (Alfadhillah *et al.*, 2023; Utari, 2020):

1. Pendidikan: Dalam lingkup pendidikan, dapat dilihat bahwa intelektual dengam mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dalam kota Yogyakarta, hal ini dapat dilihat terkait dengan menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusivitas. Melalui seminar, lokakarya, dan publikasi, mereka dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara-cara untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Misalnya, Arif Maftuhin dari UIN Sunan Kalijaga menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pendekatan medis ke pendekatan sosial dalam memahami disabilitas.
2. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan: Kaum intelektual juga terlibat dalam penelitian yang mendasari kebijakan publik. Mereka dapat memberikan data dan analisis yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif. Dalam konteks Yogyakarta,

penelitian tentang aksesibilitas infrastruktur dan layanan publik sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi.

3. Advokasi dan Kolaborasi: Kaum intelektual memiliki kemampuan untuk menjadi advokat bagi kelompok rentan. Mereka dapat mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal. Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta merupakan contoh bagaimana kolaborasi ini dapat terwujud.
4. Inovasi Sosial: Melalui pemikiran kreatif dan inovatif, kaum intelektual dapat membantu menciptakan program-program sosial yang mendukung inklusivitas. Misalnya, pengembangan Kampung Peduli Sehat Jiwa di Yogyakarta menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.
5. Monitoring dan Evaluasi: Kaum intelektual juga berperan dalam monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan inklusif. Mereka dapat membantu menilai efektivitas program-program yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kaum intelektual memiliki peran multifaset dalam akselerasi Yogyakarta sebagai kota inklusi pendidikan. Dari penyuluhan hingga advokasi, mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua warga, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan. Dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, visi Yogyakarta sebagai kota inklusif dapat tercapai secara efektif.

3.4. Keterlibatan Sektor Privat Membangun Inklusivitas di Kota Yogyakarta

Dalam pengembangan Inklusivitas di Kota Yogyakarta, tidak bisa jika tanpa campurtangan dari sektor privat. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek dari Keterlibatan sketor Privat yang dapat mengisi celah ataupun kegiatan yang dapat mendorong Inklusivitas di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini terdapat beberapa manfaat dari hadirnya keterlibatan Sektor Privat dalam Mmembangun

Inklusivitas di Kota Yogyakarta (Khairunnisa & Purnomo, 2020; Qiftiyah & Calista, 2021).

1. Inovasi dan Teknologi: Sektor privat membawa inovasi dan teknologi yang dapat mendukung inklusivitas. Contohnya, perusahaan teknologi dapat menyediakan solusi digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya. Inovasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Kemitraan Publik-Swasta: Sektor privat berperan aktif dalam kemitraan publik-swasta untuk menangani berbagai isu sosial, termasuk masalah kesehatan dan pendidikan. Contohnya, Program 1000 Pelangi Goes To Community yang diinisiasi oleh PT. Sarihusada Generasi Mahardhika, berfokus pada penanganan stunting dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Kolaborasi ini membantu meningkatkan efektivitas program-program inklusi.
3. Infrastruktur Aksesibel: Sektor privatisasi juga berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur aksesibel. Misalnya, perusahaan swasta dapat membangun fasilitas yang ramah difabel, seperti toilet aksesibel dan lift yang dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini penting agar lingkungan fisik Kota Yogyakarta semakin responsif terhadap kebutuhan semua warga.

Secara keseluruhan, keterlibatan sektor privat dalam membangun inklusivitas di Kota Yogyakarta sangat signifikan. Melalui inovasi, program CSR, kemitraan publik-swasta, pengembangan infrastruktur aksesibel, dan penyuluhan, sektor privat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Kolaborasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, sehingga Yogyakarta dapat menjadi contoh kota inklusif di Indonesia.

3.5. Sumbangsih Media dalam Mengenalkan Kota Pendidikan Inklusif

Media memainkan peran yang sangat penting dalam akselerasi Kota Yogyakarta menjadi kota inklusif, terutama dalam hal penyebaran informasi dan penguatan

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui berbagai saluran media, termasuk media sosial dan media massa tradisional, informasi mengenai kebijakan dan program-program inklusi dapat disampaikan secara efektif kepada publik. Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, telah menjalin kemitraan erat dengan media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, aktual, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan kota (Fitri, 2023; Mali, 2023; Mustaqim *et al.*, 2023b).

Selain itu, media juga berfungsi sebagai platform untuk dialog publik yang konstruktif. Dengan adanya forum diskusi dan interaksi di media sosial, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran langsung kepada pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan menyesuaikan kebijakan yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan media dalam membangun komunikasi dua arah ini sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap langkah pembangunan.

Lebih jauh lagi, media berperan sebagai agen perubahan sosial yang dapat mengadvokasi isu-isu inklusivitas. Dengan meliput kegiatan-kegiatan yang mendukung kelompok rentan dan mempublikasikan cerita-cerita inspiratif dari individu-individu dalam komunitas tersebut, media membantu membangun persepsi positif tentang keberagaman dan inklusivitas. Ini tidak hanya meningkatkan citra Kota Yogyakarta sebagai kota yang peduli terhadap semua warganya tetapi juga menginspirasi inisiatif-inisiatif baru dari sektor privat dan masyarakat sipil untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

4. Kesimpulan

Pada penelitian ini menunjukkan terkait beberapa hasil yaitu: Pertama, dalam lingkup komitmen seperti dalam pendidikan Kota Yogyakarta telah mengembangkan sistem pendidikan inklusi sejak 2008, menjadikannya salah satu kota terdepan dalam pendidikan inklusif di

Indonesia. Dengan regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008, pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas, hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam aksesibilitas terkait pelayanan publik seperti pendidikan. Kedua, dengan banyaknya jumlah disabilitas dalam usia sekolah yang cukup banyak maka sejalan dengan terbentuknya FKI. Diharapkan keberadaan FKI di Kota Yogyakarta harus mampu bertumpu pada gerakan kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi bersama dalam mewujudkan pemenuhan aksesibilitas layanan pendidikan di Kota Yogyakarta yang bersifat inklusi, merata, dan berkeadilan. Ketiga, kaum intelektual memiliki peran multifaset dalam akselerasi Yogyakarta sebagai kota inklusi pendidikan. Dari penyuluhan hingga advokasi, mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua warga, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan. Keempat, keterlibatan sektor privat dalam membangun inklusivitas di Kota Yogyakarta sangat signifikan. Melalui inovasi, program CSR, kemitraan publik-swasta, pengembangan infrastruktur aksesibel, dan penyuluhan, sektor privat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Kelima, media memiliki role yang sangat vital dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi Pendidikan, dengan menjadi platform untuk dialog publik yang konstruktif serta terkait dengan pengembangan kebijakan inklusif di Kota Yogyakarta.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih pada Universitas Jambi dan juga Universitas Selamat Sri Batang yang telah memberikan dukungan terkait dengan penulisan penelitian ini, hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Abassuni, F. D., Kristianus, & Eusabinus Bunau. (2023). Urgensi Sekolah Laboratorium Bagi Pengembangan Inovasi Sistem Pendidikan Inklusif di Kalimantan Barat. *Jurnal Borneo Akcaya*, 8(2), 82-96. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Abinda Firdaus, I., Purnamasari, R., Fadhillah, M. R., & Haskara, M. R. P. (2022). Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Inklusif di Kota Bekasi. *Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Daerah*, 7(1), 21-25. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Afriyadi, F. (2020). Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Muhammadiyah Law Review*, 4(1), 28-34. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Agustina, R. S. (2018). Evaluasi Penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 109-124. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)

- Alfadhillah, F. H., Windari, N. N., Nurparida, M., & Widyarif, M. A. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan di provinsi DI Yogyakarta (periode 2005-2021). *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 39-50. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Ansori, A. N. (2024). Sekolah Inklusif Meningkatkan 29 Persen tapi Anak-Anak Disabilitas Rentan Tak Selesaikan Pendidikan. *Liputan 6*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5630054/sekolah-inklusif-meningkat-29-persen-tapi-anak-anak-disabilitas-rentan-tak-selesaikan-pendidikan>.
- BPMP Jogja. (2024). BPMP Banten Mendalami ULD dan Layanan Pendidikan Inklusif di Yogyakarta. *BPMP Jogja*. Retrieved from <https://bpmppjogja.kemdikbud.go.id/category/berita/page/13/>.
- Fironika, R. (2015). Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43-64. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Fitri, S. E. (2023). Pemetaan Potensi Pariwisata di Kota Yogyakarta dalam Rangka Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 5(1), 31-42. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Hardiansah, E. (2015). Pengantar Edisi Khusus 55 Tahun Pendidikan Planologi: Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26(1), 1-6. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Herawati, M. (2024). Guru Pendamping Khusus Penyandang Disabilitas di Jogja Ditambah. *Harian Jogja*. Retrieved from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/01/19/510/1162073/guru-pendamping-khusus-penyandang-disabilitas-di-jogja-ditambah>.
- Hikmah, S. N. A. (2023). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan Komprehensif. *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (Jupe2)*, 1(1), 1-10. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Junianto, A. (2024). SD Negeri di Kota Jogja Kini Dilengkapi Guru Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus. *Harian Jogja*. Retrieved from <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/06/02/510/1176608/sd-negeri-di-kota-jogja-kini-dilengkapi-guru-pendamping-anak-berkebutuhan-khusus>.
- Kemendiknas. (2023). Koordinasi Penguatan Jaminan Akses Bersekolah Anak Disabilitas dalam PPDB 2023. *Kemendiknas*. Retrieved from <https://www.kemendiknas.go.id/koordinasi-penguatan-jaminan-akses-bersekolah-anak-disabilitas-dalam-ppdb-2023>.
- Khairunnisa, T., & Purnomo, E. P. (2020). Smart Urban Service: Upaya Rehabilitasi dan Preventif pengemis dan Gelandangan Kota Yogyakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 29-42. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- LLDIKTI 5. (2022). UNISA Yogya Support Pendidikan Inklusi di Yogyakarta Melalui Pelatihan Guru Reguler. *LLDIKTI 5*. Retrieved from <https://www.unisayogya.ac.id/unisa-support-pendidikan-inklusi-di-yogyakarta-melalui-pelatihan-guru-reguler/>.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Mali, M. S. (2023). Pengaruh inklusi keuangan, pengelolaan keuangan, terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Yogyakarta. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 291-296. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Mustaqim, M., Rizulloh, Z. N., & Aditya, R. (2023). Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus dari Kota Pelajar Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 54-62. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Nadhifa, Z., Caisarina, I., & Rizkiya, P. (2023). Pemenuhan Aksesibilitas Halte Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penerapan Kota Inklusif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, 7(2), 94-98. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Nisa, L. S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 47-55. [Google Scholar](#)
- Nugraheni, H. R., & Sudarwati, N. (2021). Kontribusi Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(112), 1-11. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- pedulidifabel.ukm.ugm. (2021). Pendidikan Inklusif: Antara Harapan dan Realita-Kajian Eksternal SAUDC 2021. *UKM Peduli Difabel UGM*. Retrieved from <https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2021/11/27/pendidikan-inklusif-antara-harapan-dan-realita-kajian-eksternal-saudc-2021/>.
- Persada, S. (2021). Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif. *Tempo*. Retrieved from <https://www.tempo.co/politik/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses-pendidikan-inklusif-448726>.
- Purwantara. (2019). Ide Kota Inklusif di Kota Yogyakarta: Persepsi Publik. *Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada*. Retrieved from <https://mpwk.ugm.ac.id/2019/02/08/ide-kota-inklusif-di-kota-yogyakarta-persepsi-publik/>.
- Qiftiyah, M., & Calista, W. (2021). Shadow teacher for special needs students: case study class vi taman muda ibu pawiyatan Yogyakarta. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 13(1), 26-35. [Google Scholar](#)
- Rakhmawanti, S. (2024). Membangun Kolaborasi Bersama, Wujudkan Layanan di ULD yang Berkualitas. Retrieved from <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/membangun-kolaborasi-bersama-wujudkan-layanan-di-uld-yang-berkualitas/>.
- Rozali, A. (2017). Menuju Kota Inklusi, Yogyakarta Luncurkan Kampung Peduli Sehat Jiwa. Retrieved from <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/5863>.
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: Literature Review. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 209-217. [Google Scholar](#)
- Rusqiyati, E. A. (2015). Yogyakarta rintis empat kecamatan inklusi. *Antara News*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/532759/yogyakarta-rintis-empat-kecamatan-inklusi>.
- Rusqiyati, E. A. (2019). Yogyakarta Ingin Jadi Barometer Kota Inklusif. *Antara News*. Retrieved from <https://jogja.antaraneews.com/berita/404243/yogyakarta-ingin-jadi-barometer-kota-inklusi>.
- Sahrudin, M., Djafri, N., & Sukung, A. (2023). Pengelolaan Pendidikan Inklusif Jambura Journal of Educational Management. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(1), 162-179. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Sartica, D., & Ismanto, B. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangka Raya 1. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 49. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Septiana, F., & Zulfa, E. (2019). Mewujudkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *Inclusive: Journal of Special Education*, V(01), 11-18. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Setiawan, A., Sembiring, R. A., & Six Maria, W. (2019). Layanan Pojok Braille Dalam Meningkatkan Literasi Baca Bagi Disabilitas Netra di Kota Malang. *Jurnal Transformatif*, 5(1), 70-86. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Sholihah, A., & Chrysoekamto, R. (2021). Penerapan Manajemen Pengembangan Minat dan Bakat untuk Meningkatkan Potensi Siswa di Madrasah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131-139. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Sijogja, A. (2023). 1.200-an Anak Penyandang Disabilitas di DIY Tak Sekolah SLB, Ternyata Ini Faktornya. *Sijogja*. Retrieved from <https://www.sijogja.com/news/1849671924/1200-an-anak-penyandang-disabilitas-di-diy-tak-sekolah-slb-ternyata-ini-faktornya>.
- Sunartono. (2023). Jogja Peringkat Teratas Jadi Kota Tujuan Pendidikan. *Harian Jogja*. Retrieved from <https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/10/29/642/1152913/jogja-peringkat-teratas-jadi-kota-tujuan-pendidikan>.
- Suranto, J., & Suhita, D. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif. *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 6(2). [Google Scholar](#)
- Syafiul. (2024). Jaga Kualitas Pendidikan Inklusi, ULD Tambah Guru Pendamping Khusus Tahun 2024. Retrieved from <https://dindikpora.jogjakota.go.id/detail/index/31331>.

- UNICEF. (2023). Laporan Terbaru Menunjukkan Anak-anak dengan Disabilitas Tertinggal dalam Semua Indikator Perkembangan Anak. *UNICEF*. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id/disabilitas/siaran-pers/laporan-terbaru-menunjukkan-anak-anak-dengan-disabilitas-tertinggal-dalam-semua>.
- Utama, A. H. (2021). Model Desain Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3), 140–151. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Utari, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Juara Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 175–188. [Google Scholar](#)
- Warsilah, H. (2015). Inclusive Development Approach for Reducing Social Exclusion in Urban Area: a Case Study of Marginal Groups in Kampung Semanggi, Solo, Central Java. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(2), 207–232. [Google Scholar](#)
- Warta Jogja Kota. (2024). Pendidikan Inklusi di Yogya Jadi Acuan Belajar Kabupaten Parigi Moutong. Retrieved from <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/32091>.
- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 14(2), 368–378. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Wicaksono, P. (2020). Seluruh Kecamatan di Yogyakarta Wajib Punya Forum Inklusif. *Tempo*. Retrieved from <https://www.tempo.co/politik/seluruh-kecamatan-di-yogyakarta-wajib-punya-forum-inklusi-612012>.